



Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Sumatera Barat

Dini Abdianti^{1*}, Novera Martilova²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

*Korespondensi penulis: diniabdianti24@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by problems with the development of the labor force participation rate and provincial minimum wages which are not in line with the development of unemployment in West Sumatra in 1994-2023. This research aims to find out and analyze how much influence the level of labor force participation and the provincial minimum wage have on unemployment in West Sumatra. This research uses quantitative methods with associative research. The data used is secondary data taken from the West Sumatra Central Statistics Agency (BPS) for 1994-2023. The data collection techniques used were observation and documentation. The data analysis techniques used are classical assumption testing, multiple linear regression analysis, coefficient of determination (R²) testing and hypothesis testing. This research uses SPSS ver. 25 to process data. The research results show that the labor force participation rate variable has a t-count > t-table value (9.113 > 2.052) with a significant value of 0.000 < 0.05, which means that the labor force participation rate has a significant and influential effect on unemployment in West Sumatra. The provincial minimum wage variable has a t-count > t-table value (6.688 > 2.052) with a significant value of 0.000 < 0.05, which means that the provincial minimum wage has a significant influence on unemployment in West Sumatra. Simultaneously, the level of labor force participation and the provincial minimum wage on unemployment in West Sumatra have a value of f-count > f-table (42.123 > 3.340) with a significant value of 0.000 < 0.05, which means that the level of labor force participation and the provincial minimum wage have a significant effect. simultaneous impact on unemployment in West Sumatra.*

Keywords: *Labor Force Participation Rate, Provincial Minimum Wage, Unemployment.*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan pada perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum provinsi yang tidak sejalan dengan perkembangan pengangguran di Sumatera Barat tahun 1994-2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat tahun 1994-2023. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R²) dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan SPSS ver. 25 untuk mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki nilai t-hitung > t-tabel (9,113 > 2,052) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Variabel upah minimum provinsi memiliki nilai t-hitung > t-tabel (6,688 > 2,052) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa upah minimum provinsi berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Secara simultan tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Sumatera Barat memiliki nilai f-hitung > f-tabel (42,123 > 3,340) dengan nilai signifikannya 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum provinsi berpengaruh secara simultan terhadap pengangguran di Sumatera Barat.

Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, Pengangguran.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang umumnya menghadapi berbagai masalah mulai dari masalah ketenagakerjaan. Dimana keadaan ini dapat muncul karena banyaknya jumlah angkatan kerja yang masih belum memperoleh pekerjaan, semakin meningkat namun tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang mencukupi. Angkatan kerja yang besar tentu membutuhkan adanya lapangan pekerjaan yang mencukupi namun kenyataannya kondisi lowongan kerja pada lapangan yang dibutuhkan tidak tersedia sebanyak angkatan kerja yang ada. Kondisi jumlah angkatan kerja yang meningkat tinggi dibanding dengan ketersediaan kesempatan kerja yang ada akan mengakibatkan pengangguran lebih meningkat (Arafah Putri Fadilah, 2018).

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang pertumbuhan penduduknya cenderung meningkat, apabila hal ini tidak diiringi dengan penciptaan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Hal ini membawa berbagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran untuk memenuhi permintaan hidup masyarakat seperti sandang, pangan, prasarana kesehatan, pendidikan dan juga dalam hal penyediaan lapangan kerja.

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan upah minimum. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya memilih dan memfokuskan pada dua faktor saja yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja serta upah minimum provinsi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja mampu mempengaruhi pengangguran, dimana semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik. Bila peningkatan tersebut seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, namun jika pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja. Hal ini dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan dalam menampung angkatan kerja tersebut (S.Mulyadi, 2014). Permasalahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga dirasakan di Provinsi Sumatera Barat, dimana angka tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat masih tergolong tinggi setiap tahunnya di bandingkan jumlah penduduk yang telah bekerja. Dengan banyaknya tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi dibanding dari angka jumlah penduduk yang telah bekerja dapat menunjukkan bahwa tingkat tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat masih terbilang banyak yang belum terserap, hal ini dapat berdampak pada angka pengangguran yang meningkat karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Upah minimum menjadi salah satu aspek yang berpengaruh pada tingkat kesempatan kerja dan masalah pengangguran. Tingkat upah yang cenderung tinggi mampu memicu tinggi minat para pencari kerja pada suatu perusahaan agar memperoleh upah yang menjamin. Namun kondisi ini dapat pula berbanding terbalik pada pihak perusahaan, dimana ketika peningkatan upah minimum yang melebihi tingkat pasar dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Peningkatan ini yang menyebabkan sejumlah pengusaha mengurangi tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan tingkat pengangguran. Tingkat upah minimum provinsi Sumatera Barat pada setiap tahunnya selalu cenderung mengalami peningkatan, dimana hal tersebut tentu dapat mempengaruhi angka pengangguran.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum memperoleh pekerjaan tersebut.

Menurut Putong, (2018) pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerjanya. Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi di atas usia anak-anak (usia 14 tahun hingga 64 tahun).

Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan atau seseorang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari pekerjaan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran menurut Sukirno yaitu :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun ke tahun sebelumnya. Jika tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah atau

perlambatan ekonomi dapat mengakibatkan kurangnya penciptaan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan tingkat pengangguran.

b. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi.

Sedangkan menurut Mulyadi, faktor yang mempengaruhi pengangguran adalah:

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi cenderung meningkatkan tingkat pengangguran karena lebih banyak orang yang aktif mencari pekerjaan. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi yang rendah dapat menurunkan tingkat pengangguran karena sejumlah orang mungkin tidak dihitung sebagai pengangguran karena tidak aktif mencari pekerjaan.

Sedangkan menurut Haryani, (2002) Faktor yang mempengaruhi pengangguran adalah:

a. Upah Minimum

Upah adalah suatu penerimaan berupa imbalan dari pemberi kerja yang diberikan kepada penerima kerja atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Semakin tinggi tingkat upah, semakin kecil permintaan pengusaha akan tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

1. Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat didefinisikan sebagai ukuran proporsi penduduk umur kerja yang melihat secara aktif dipasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

Menurut Mulyadi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah situasi yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. Kemudian menurut Simanjuntak, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau Labour Force Participation Rate (LFPR) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dalam kelompok yang sama. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Angkatan kerja}}{\text{Tenaga Kerja}} \times 100 \%$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja adalah angka perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang biasanya dinyatakan dalam persentase.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, yakni:

- a. Jumlah penduduk yang masih bersekolah
- b. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga
- c. Tingkat penghasilan keluarga
- d. Struktur Umur
- e. Tingkat Upah Semakin tinggi
- f. Tingkat Pendidikan.
- g. Kegiatan perekonomian. (Sonny Sumarsono, 2009)

Upah Minimum Provinsi

1. Pengertian Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pengertian upah minimum dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 tahun 1999, upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Kebijakan upah minimum di dalam Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya antara lain:

- a. Pemerintah menetapkan upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Upah Minimum dapat diterapkan:

- 1) Berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
 - 2) Berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.
- c. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
 - d. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Dimana penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan itu. (Wiratna Sujarweni, 2019) dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah Asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastistas), analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2) dan uji hipotesis (uji t dan uji f).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual/variasi pengganggu berdistribusi normal atau tidak. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov dari SPSS terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	69458.10636508
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.066
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: SPSS 25 (Data diolah,2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan kolmogorov smirnov test di atas, nilai signifikansinya adalah 0,200 ini berarti bahwa $0,200 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang digunakan adalah dengan uji *Durbin Watson* (uji DW).

Berikut adalah hasil uji autokorelasi dari SPSS terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.870 ^a	.757	.739	71984.676	.505
a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Provinsi (Rupiah) (X2), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (X1)					
b. Dependent Variable: Pengangguran (Y)					

Sumber: SPSS 25 (Data diolah,2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW) menunjukkan bahwa nilai d nya adalah 0,505 yang menggunakan signifikan 5% dengan jumlah data (n) sebanyak 30 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 2, maka didapatkan nilai dU sebesar 1,5666 dan nilai dL sebesar 1,2837. Sedangkan nilai $4-dU$ adalah 2434 dan nilai $4-dL$ adalah 27163. Berdasarkan hasil perhitungan Durbin Watson, posisi DW berada diantara 0 dan dL atau $0 < d < dL$ ($0 < 0,505 < 1,2837$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi positif

Karena terjadi autokorelasi positif maka perlu dilakukan perbaikan masalah autokorelasi dengan menggunakan metode Cochrane-Orcutt. Model Cochrane-Orcutt mengasumsikan bahwa residual et mengikuti pola autoregresif (ARI) sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Autokorelasi Metode Cochrane-Orcutt

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.721 ^a	.520	.484	45843.70804	1.765
a. Predictors: (Constant), Lag_X2, Lag_X1					
b. Dependent Variable: Lag_Y					

Sumber: SPSS 25 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 3, hasil autokorelasi metode Cochrane Orcutt. Nilai Durbin Watson (DW) meningkat menjadi 1.765. Berdasarkan tabel Durbin Watson (DW) pada signifikan 5%, maka di dapatkan nilai dU sebesar 1.5666 dan nilai dL sebesar 1.2837. Berdasarkan hasil perhitungan posisi Durbin Watson berada diantara dU dan $4-dU$ atau $dU < d < 4-dU$ ($1.5666 < 1.765 < 2.4334$). sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yaitu dengan cara dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) atau nilai tolerance karena cara tersebut dinilai paling mudah. Apabila nilai VIF < 10 atau nilai tolerance $> 0,10$ maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Namun apabila nilai VIF > 10 atau nilai tolerance $< 0,10$ maka diantara variabel bebas penelitian terdapat gejala multikolinearitas. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas dari SPSS terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (X1)	.351	2.846
	Upah Minimum Provinsi (Rupiah) (X2)	.351	2.846

a. Dependent Variable: Pengangguran (Y)

Sumber: SPSS 25 (Data diolah,2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai VIF variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (X1) dan variabel upah minimum provinsi (X2) adalah $2,846 < 10$ dan nilai tolerance value $0,351 > 0,1$. maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengalami multikolinearitas maka H_0 di tolak.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual pada suatu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan metode uji glejser. Berikut adalah hasil uji heteoskedastisitas dengan metode glejser dari SPSS terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan metode Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	63016.089	27369.421		2.302	.029
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (X1)	-181.817	355.898	-.165	-.511	.614
Upah Minimum Provinsi (Rupiah) (X2)	.010	.016	.200	.620	.541

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: SPSS 25 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glejser pada variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki nilai signifikan sebesar $0,614 > 0,05$ dan Upah Minimum Provinsi memiliki nilai signifikan sebesar $0,541 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan model regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antar variabel tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Berikut hasil perhitungan SPSS regresi pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-176526,641	45179,694		-3,907	,001
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (X1)	5353,650	587,493	1,457	9,113	,000
	Upah Minimum Provinsi (Rupiah) (X2)	-,173	,026	-1,070	-6,688	,000

a. Dependent Variable: Pengangguran (Y)

Sumber: SPSS 25 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 6 diatas dengan memperhatikan angka pada Unstandardized Coefficients Beta, maka dapat diperoleh hasil regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -176526,641 + 5353,650 - 0,173 + 45179,694$$

Dimana:

a= konstanta = -176526,641

X₁ = Tingkat Partisipasi angkatan kerja

X₂ = Upah Minimum Provinsi

b₁ = 5353,650

b₂ = -0,173

$$e = 45179,694$$

Dari persamaan regresi liner berganda diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai sebesar -176526,641 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel pengangguran dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (X1) dan variabel upah minimum provinsi (X2).
2. Berdasarkan hasil perhitung uji regresi linear bergada, koefisien regresi pada variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki nilai koefisien sebesar 5353,650. Hasil perhitungan koefisien regresi bernilai positif yang berarti terjadi hubungan positif antara tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Dimana jika tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat maka pengangguran di Sumatera Barat akan naik sebesar 5353,650 dan begitu juga dengan sebaliknya jika tingkat partisipasi angkatan kerja turun maka pengangguran di Sumatera Barat akan turun sebesar 5353,650 dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.
3. Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi linear berganda, koefisien regresi pada variabel upah minimum provinsi memiliki nilai koefisien sebesar -0,173. Hasil perhitungan koefisien bernilai negatif yang berarti terjadi hubungan negatif antara upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Dimana jika upah minimum provinsi naik maka pengangguran di Sumatera Barat akan turun sebesar 0,173 dan begitu juga dengan sebaliknya jika upah minimum provinsi turun maka pengangguran di Sumatera Barat akan naik sebesar 0,173 dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t)

Uji Parsial atau uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas . jika t -hitung $>$ t -tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh). Dan jika t -hitung $<$ t -tabel maka H_0 diterima dan H_a di tolak (tidak berpengaruh).

Berikut adalah hasil perhitungan uji t dari SPSS terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Uji Parsial (t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-176526.641	45179.694		-3.907	.001
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (X1)	5353.650	587.493	1.457	9.113	.000
Upah Minimum Provinsi (Rupiah) (X2)	-.173	.026	-1.070	-6.688	.000

a. Dependent Variable: Pengangguran (Y)

Sumber: SPSS 25 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 7 di atas, Dari hasil analisis uji t pada variabel tingkat partisipasi angkatan kerja diperoleh t-hitung > t-tabel (9,113 > 2,052) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh dan signifikan secara positif terhadap pengangguran di Sumatera Barat.

Kemudian dari hasil analisis uji t pada variabel upah minimum provinsi diperoleh t-hitung > t-tabel (6,688 > 2,052) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh dan signifikan secara negatif terhadap pengangguran di Sumatera Barat.

2. Uji Simultan (f)

Uji Simultan atau uji F bertujuan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Jika nilai f-hitung > f-tabel maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan jika f-hitung < f-tabel maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Berikut adalah hasil perhitungan uji f dari SPSS terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Uji Simultan (f)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	436546312847.324	2	218273156423.662	42.123	.000 ^b
Residual	139908427654.843	27	5181793616.846		
Total	576454740502.167	29			
a. Dependent Variable: Pengangguran (Y)					
b. Predictors: (Constant), Upah Minimum Provinsi (Rupiah) (X2), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (X1)					

Sumber: SPSS 25 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 8 Hasil uji simultan (f) diperoleh nilai f-hitung > f-tabel ($42,123 > 3,340$) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Sumatera Barat secara simultan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besar persentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,870 ^a	,757	,739	71984,676
a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Provinsi (Rupiah) (X2), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (X1)				
b. Dependent Variable: Pengangguran (Y)				

Sumber: SPSS 25 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 9 di atas, dapat dilihat bahwa nilai dari R^2 (R square) adalah sebesar 0,757 atau 75,7 %. Hal ini membuktikan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Sumatera Barat berpengaruh sangat kuat dan

berkontribusi sangat besar yaitu 0,757 atau 75,7 % dan untuk sisanya yaitu 0,243 atau 24,3 % dijelaskan oleh variabel lain atau variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini yaitu: pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Pembahasan

1. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil penelitian ini di peroleh bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran. Dibuktikan dengan hasil variabel tingkat partisipasi angkatan kerja mempunyai nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel ($9,113 > 2,052$) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat.

Hal ini dapat terjadi karena ketika tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat meningkat dan tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang cukup luas untuk menyerap tenaga kerja, maka dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran di suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan yang digunakan untuk menampung tenaga kerja di Sumatera Barat.

Pernyataan ini sesuai dengan teori dari Mulyadi mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja. Jika hal sebaliknya terjadi ketika tingkat partisipasi angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang mendapatkan pekerjaan yang disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan dalam menampung angkatan kerja. akan berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dena Putri Bastari (2019) yang menyatakan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran. Ketika terjadi peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja, maka akan meningkatkan tingkat pengangguran. Banyaknya jumlah angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan produksi barang dan jasa. Dengan meningkatnya produksi dan jasa, maka akan membutuhkan banyak pekerja untuk proses produksi, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

2. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran. Hal ini dapat dibuktikan

dengan hasil variabel upah minimum provinsi mempunyai nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($6,688 > 2,052$) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ berarti upah minimum provinsi berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat.

Hal ini dapat terjadi karena ketika upah minimum meningkat, maka perusahaan penyedia lapangan pekerjaan cenderung menurunkan tingkat permintaan tenaga kerja, dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Namun, dari sisi tenaga kerja kondisi ini sangat menguntungkan para tenaga kerja, karena akan menaikkan pendapatan dan tingkat konsumsi mereka.

Pernyataan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Haryani, dimana semakin tinggi tingkat upah, semakin kecil permintaan pengusaha akan tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Pendapat yang sama yang dikemukakan oleh Todaro yang mengatakan semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja maka akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja, hal ini berarti bahwa pengangguran akan meningkat.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian oleh Raka Muhammad Ziddan dan Rachmad Kresna Sakti (2022) yang menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran. Setiap peningkatan upah yang diterima oleh tenaga kerja, akan meningkatkan angka pengangguran. Hal ini dikarenakan jika upah minimum meningkat, maka perusahaan penyedia lapangan kerja cenderung menurunkan tingkat permintaan tenaga kerja, dengan mengganti tenaga kerja operator menjadi tenaga kerja mesin yang berakibat pemutusan hubungan kerja. Ketika upah minimum terus meningkat, maka lapangan kerja yang tersedia semakin sedikit.

3. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan bahwasanya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Hal ini berdasarkan nilai $f\text{-hitung}$ yaitu 42,123 dengan $f\text{-tabel}$ sebesar 3,340 dan nilai signifikan 0,000 maka $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini juga didukung dengan nilai dari R^2 (R square) adalah sebesar 0,757 atau 75,7 %. Hal ini membuktikan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Sumatera Barat berpengaruh sangat kuat dan berkontribusi sangat besar yaitu 0,757 atau 75,7% dan untuk sisanya yaitu 0,243 atau 24,3 %

dijelaskan oleh variabel lain atau variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini yaitu: pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian tentang “ Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Sumatera Barat ”. Dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Hal ini berdasarkan uji t dimana $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($9,113 > 2,052$) dengan nilai signifikan yang di dapat adalah ($0,000 < 0,05$) . Upah Minimum Provinsi berpengaruh dan signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Hal ini berdasarkan hasil uji t dimana $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($6,688 > 2,052$) dengan nilai signifikan yang di dapat ($0,000 < 0,05$).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Sumatera Barat secara bersamaan berpengaruh. Hal ini dikarenakan nilai $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$ ($42,123 > 3,340$) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ artinya tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Sumatera Barat berpengaruh secara signifikan. Hal ini juga didukung dengan nilai dari R^2 (R square) adalah sebesar 0,757 atau 75,7 %. Hal ini membuktikan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Sumatera Barat berpengaruh sangat kuat dan berkontribusi sangat besar yaitu 0,757 atau 75,7% dan untuk sisanya yaitu 0,243 atau 24,3 % dijelaskan oleh variabel lain.

DAFTAR REFERENSI

- Bastari, D. P. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2010-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Doni, A. H., Wahyudi, A., & Mahmud, M. (2022). Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional. *JEMAS: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 2(1).
- Fadilah, A. P. (2018). Analisis penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. *Jurnal Publikasi: UII Yogyakarta*, 2(16).
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haryani, S. (2002). *Hubungan industrial di Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Huda, N. (2008). *Ekonomi makro Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Ibrahim, Z. (2013). *Pengantar ekonomi makro* (Edisi revisi). Banten: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Maulana, R. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Pulau Jawa. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24(3).
- Mulyadi, M. (2016). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. *Badan Keahlian DPR RI: Kajian*, 21(3).
- Mulyadi, S. (2014). *Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putong, I. (2008). *Economics: Pengantar mikro dan makro* (Edisi kedua). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ridwan, M. (2013). *Ekonomi pengantar mikro & makro Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Simajuntak, P. J. (1985). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Jakarta: Penerbit FE UI.
- Subhan, M. (2018). Pengangguran dan tawaran solutif dalam perspektif Islam. *Jurnal STAI Miftahul Ulum Pamekasan*, 3(1).
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi penelitian bisnis & ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sukirno, S. (2006). *Pengantar ekonomi makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan kebijakan publik ekonomi sumber daya manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparmono. (2018). *Pengantar ekonomi makro: Teori, soal dan penyelesaiannya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ziddan, R. M., Kusuma, D. F., & Nabila, S. (2022). Pengaruh investasi, upah minimum provinsi, dan inflasi terhadap angka pengangguran di Indonesia tahun 2015-2019. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(3).